

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
UCAPAN TERIMAKASIH	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian.....	9
1.3.1 Maksud Penelitian.....	9
1.3.2 Tujuan Penelitian	9
1.4 Kegunaan Penelitian	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS	11
2.1 Kajian Pustaka	11
2.1.1 Pengetahuan Anggaran Anggota legislatif daerah	11
2.1.1.1 Pengetahuan	11
2.1.1.2 Lembaga Legislatif Daerah	16
2.1.1.2.1 Tugas Dan Wewenang	17
2.1.1.3 Konsep Anggaran Sektor Publik	19

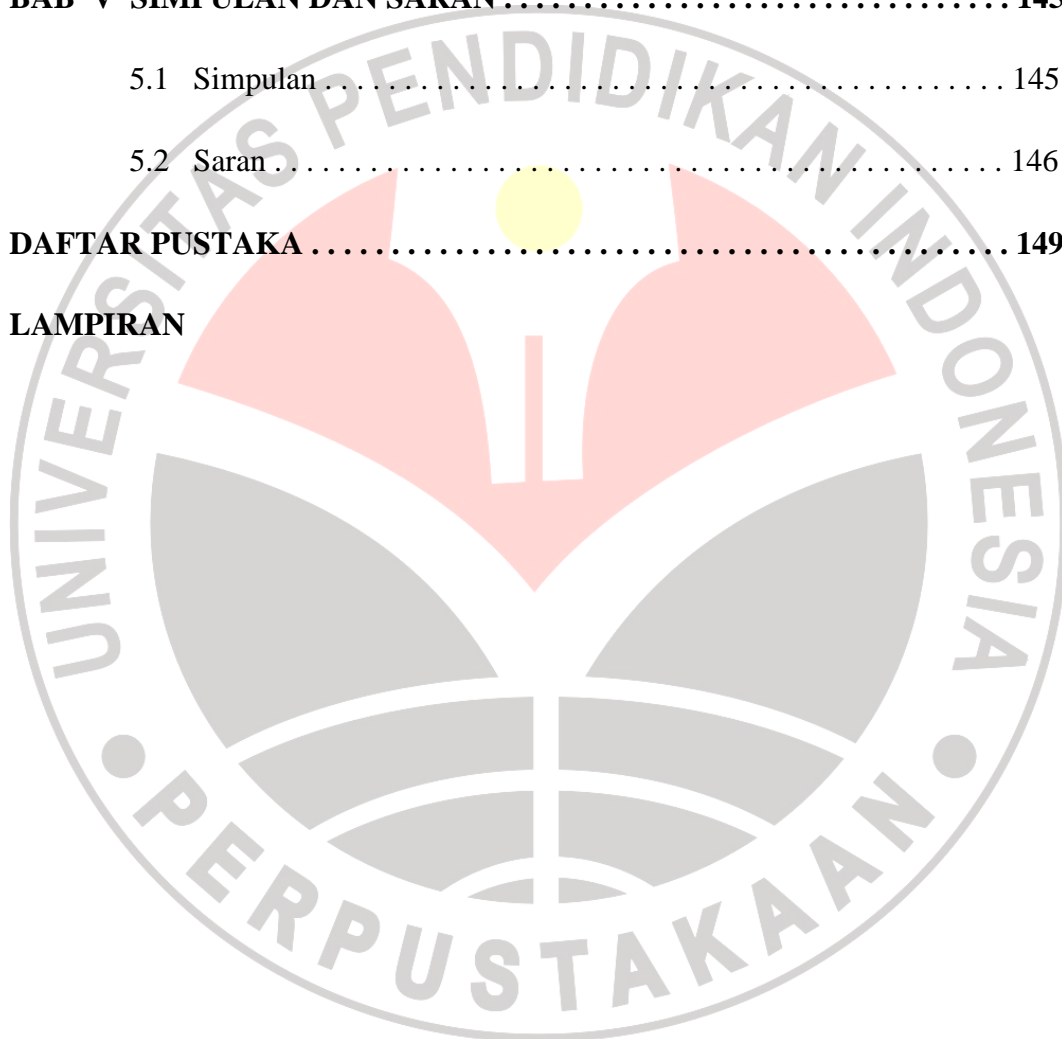
2.1.1.4.1 Pengertian Anggaran	19
2.1.1.4.2 Jenis-Jenis Anggaran Sektor Publik	22
2.1.1.4.3 Prinsip-Prinsip Anggaran	23
2.1.1.4.4 Tahapan Dalam Penyusunan Anggaran	25
2.1.2 Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	28
2.1.2.1 Pengertian APBD	28
2.1.2.2 Fungsi APBD	29
2.1.2.3 Pengertian Pengawasan	30
2.1.3 Akuntabilitas	34
2.1.3.1 Pengertian Akuntabilitas	34
2.1.3.2 Dimensi dalam Akuntabilitas	37
2.1.4 Pengaruh antara Pengetahuan Anggota legislatif daerah tentang Anggaran terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)	40
2.1.5 Pengaruh antara Pengetahuan tentang Anggaran, Akuntabilitas terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)	43
2.2 Kerangka Pemikiran	44
2.3 Hipotesis	52
BAB III OBYEK DAN METODE PENELITIAN	53
3.1 Objek Penelitian.	53
3.2 Metode Penelitian.	53
3.2.1 Desain Penelitian.	53

3.2.2	Definisi dan Operasionalisasi Variabel.	54
3.2.3	Populasi dan Sampel Penelitian.	59
3.2.4	Teknik Pengumpulan Data.	60
3.2.5	Teknis Analisis Data.	62
3.2.5.1	Analisis Statistik	63
3.2.5.1.1	Uji Validitas	63
3.2.4.1.2	Uji Reliabilitas	64
3.2.4.1.3	Transformasi Data Ordinal ke Data Interval	64
3.2.4.1.4	Uji Asumsi Klasik	65
3.2.5.2	Pengujian Terhadap Hipotesis.	68
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	74
4.1	Hasil Penelitian	74
4.1.1	Tinjauan Umum Subjek Penelitian	74
4.1.1.1	Letak Geografis Kabupaten Sukabumi	74
4.1.1.2	Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi	77
4.2	Deskripsi Data Responden	79
4.3	Deskripsi Data Variabel Penelitian	80
4.4	Uji Kualitas Data	80
4.4.1	Pengujian Validitas Instrumen	80
4.4.1.1	Pengujian Validitas Instrumen Variabel X1 (Pengetahuan Anggota Legislatif Daerah Tentang	

Anggaran)	81
4.4.1.2 Pengujian Validitas Instrumen Variabel X2 (Akuntabilitas)	82
4.4.1.3 Pengujian Validitas Instrumen Variabel Y (Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)	84
4.4.2 Pengujian Reliabilitas Instrumen	86
4.4.2.1 Pengujian Reliabilitas Instrumen Variabel X1 (Pengetahuan Anggota Legislatif Daerah Tentang Anggaran)	87
4.4.2.2 Pengujian Reliabilitas Instrumen Variabel X2 (Akuntabilitas)	87
4.4.2.3 Pengujian Reliabilitas Instrumen Variabel Y (Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)	88
4.4.3 Analisa Statistik	89
4.4.3.1 Uji Asumsi Klasik	89
4.4.4 Deskripsi Data	94
4.4.4.1 Deskripsi Data Variabel X1 (Pengetahuan Anggota Legislatif Daerah Tentang Anggaran). . . .	94
4.4.4.1.1 Deskripsi Data Variabel X1 Perindikator . . .	95
4.4.4.1.2 Deskripsi Data Variabel X1 Secara	

Keseluruhan	101
4.4.4.2 Deskripsi Data Variabel X2 (Akuntabilitas)	102
4.4.4.2.1 Deskripsi Data Variabel X2 Perindikator	102
4.4.4.2.2 Deskripsi Data Variabel X1 Secara Keseluruhan	113
4.4.4.3 Deskripsi Data Variabel Y (Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)	114
4.4.4.3.1 Deskripsi Data Variabel Y Perindikator	114
4.4.4.3.2 Deskripsi Data Variabel Y Secara Keseluruhan	123
4.4.5 Transformasi Data	124
4.4.6 Uji Hipotesis	124
4.5 Pembahasan	134
4.5.1 Pengetahuan Anggota Legislatif Tentang Anggaran	134
4.5.2 Akuntabilitas	135
4.5.3 Pengawasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah	137
4.5.4 Pengaruh Pengetahuan Anggota Legislatif Daerah Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah	138

4.5.5 Pengaruh Pengetahuan Anggota Legislatif Daerah Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dengan Akuntabilitas Sebagai Variabel Moderating	141
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	145
5.1 Simpulan	145
5.2 Saran	146
DAFTAR PUSTAKA	149
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Penelitian Terdahulu Yang Relevan	7
Tabel 3.1	Operasionalisasi Variabel Pengetahuan anggota legislatif daerah tentang anggaran	58
Tabel 3.2	Operasionalisasi Variabel Akuntabilitas.....	58
Tabel 3.3	Operasionalisasi Variabel Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.....	59
Tabel 3.4	Interpretasi Skor.....	62
Tabel 4.1	Daftar anggota legislatif daerah kabupaten Sukabumi.....	78
Tabel 4.2	Data Responden	79
Tabel 4.3	Hasil Uji Validitas Variabel X1	82
Tabel 4.4	Hasil Uji Validitas Variabel X2	83
Tabel 4.5	Hasil Uji Validitas Variabel Y	85
Tabel 4.6	Hasil Uji Reliabilitas Variabel X1	87
Tabel 4.7	Hasil Uji Reliabilitas Variabel X2	88
Tabel 4.8	Hasil Uji Reliabilitas Variabel Y	88
Tabel 4.9	Uji Normalitas.....	90
Tabel 4.10	Uji Multikolinearitas.....	91

Tabel 4.11 Uji Heteroskedastisitas.	92
Tabel 4.12 Hasil Uji Autokorelasi.	94
Tabel 4.13 Tanggapan responden mengenai tentang pertanyaan mengetahui tatacara pelaksanaan APBD.	95
Tabel 4.14 Tanggapan responden mengenai tentang pertanyaan memiliki pemahaman tentang penyusunan APBD berdasarkan peraturan terkait.	97
Tabel 4.15 Tanggapan Responden mengenai tentang pertanyaan mendeteksi serta identifikasi terhadap pemborosan, kegagalan atau kebocoran anggaran.	99
Tabel 4.16 Rekapitulasi Rata-Rata Jawaban Untuk Variabel X1.	101
Tabel 4.17 Tanggapan Responden mengenai tentang pertanyaan pertanggungjawaban Pemerintah secara terbuka, menyediakan informasi secara cepat dan tepat kepada masyarakat.	103
Tabel 4.18 Tanggapan responden mengenai tentang pertanyaan memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik.	105
Tabel 4.19 Tanggapan responden mengenai tentang pertanyaan memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan.	107
Tabel 4.20 Tanggapan responden mengenai tentang pertanyaan menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik.	109
Tabel 4.21 Tanggapan Responden mengenai tentang pertanyaan adanya sarana	

bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah.	111
Tabel 4.22 Rekapitulasi Rata-Rata Jawaban Untuk Variabel X2.	113
Tabel 4.23 Tanggapan responden mengenai tentang pertanyaan pengawasan saat penyusunan	115
Tabel 4.24 Tanggapan responden mengenai tentang pertanyaan pengawasan saat pengesahan	117
Tabel 4.25 Tanggapan responden mengenai tentang pertanyaan pengawasan saat pelaksanaan	119
Tabel 4.26 Tanggapan responden mengenai tentang pertanyaan pengawasan saat pertanggungjawaban anggaran.	121
Tabel 4.27 Rekapitulasi Rata-Rata Jawaban Untuk Variabel Y	123
Tabel 4.28 Hasil Uji F Statistik antara Pengetahuan Anggota legislatif Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan APBD.	125
Tabel 4.29 Analisis Regresi Sederhana	125
Tabel 4.30 Hasil Koefisien Determinasi Hipotesis Pertama.	128
Tabel 4.31 Uji F Statistik (Uji Signifikansi Simultan) Akuntabilitas dalam Memoderasi Pengetahuan Anggota Legislatif Daerah Tentang Anggaran terhadap Pengawasan APBD.	129
Tabel 4.32 Hasil Analisis Regresi dengan Uji Interaksi	130
Tabel 4.33 Hasil Koefisien Determinasi Hipotesis Kedua	133

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Bagian Kerangka Pemikiran	52
Gambar 2.2	Model penelitian	52
Gambar 4.1	Uji Normalitas	90
Gambar 4.2	Uji Heteroskedastisitas	93
Gambar 4.3	Garis kontinum mengenai tentang pertanyaan mengetahui tatacara pelaksanaan APBD	96
Gambar 4.4	Garis kontinum memiliki pemahaman tentang penyusunan APBD berdasarkan peraturan terkait	98
Gambar 4.5	Garis kontinum tentang pertanyaan mendeteksi serta Identifikasi terhadap pemborosan, kegagalan atau kebocoran anggaran	100
Gambar 4.6	Garis kontinum tentang pertanyaan pertanggungjawaban Pemerintah secara terbuka, menyediakan informasi secara cepat dan tepat kepada masyarakat	104
Gambar 4.7	Garis kontinum tentang pertanyaan memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik	106
Gambar 4.8	Garis kontinum tentang pertanyaan memberikan ruang	

	bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan	108
Gambar 4.9	Garis kontinum tentang pertanyaan menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik	110
Gambar 4.10	Garis kontinum tentang pertanyaan adanya sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah	112
Gambar 4.11	Garis kontinum tentang pertanyaan pengawasan saat penyusunan.	116
Gambar 4.12	Garis Kontinum tentang pertanyaan pengawasan saat pengesahan	118
Gambar 4.13	Garis kontinum tentang pertanyaan pengawasan saat pelaksanaan.	120
Gambar 4.14	Garis kontinum tentang pertanyaan pengawasan saat pertanggungjawaban anggaran	122

DAFTAR LAMPIRAN

- 
- Lampiran 1 Surat Keputusan Sidang
- Lampiran 2 Surat Permohonan Izin Penelitian
- Lampiran 3 Surat Keterangan Pemerintah Kabupaten Sukabumi KANTOR
KESBANGPOL DAN LINMAS
- Lampiran 4 Kartu Disposisi
- Lampiran 5 Formulir Frekuensi Bimbingan
- Lampiran 6 Lembar Pengesahan Usulan Penelitian
- Lampiran 7 Formulir Persetujuan Perbaikan (Revisi) Seminar Usulan
Penelitian
- Lampiran 8 Formulir Persetujuan Perbaikan (Revisi) Sidang Skripsi
- Lampiran 9 Data Responden
- Lampiran 10 Tabel Data Ordinal Variabel X1 (Pengetahuan Anggota Legislatif
Daerah Tentang Anggaran)
- Lampiran 11 Tabel Data Ordinal Variabel X2 (Akuntabilitas)
- Lampiran 12 Tabel Data Ordinal Variabel Y (Pengawasan Anggaran pendapatan
Dan Belanja Daerah)
- Lampiran 13 Validitas

Lampiran 14 Tabel MSI Variabel X1 (Pengetahuan Anggota Legislatif Daerah
Tentang Anggaran)

Lampiran 15 Tabel MSI Variabel X2 (Akuntabilitas)

Lampiran 16 Tabel MSI Variabel Y (Pengawasan Anggaran pendapatan Dan
Belanja Daerah)

Lampiran 17 Perhitungan SPSS

Lampiran 18 Reliabilitas

Lampiran 19 Tabel Perhitungan Regresi

Lampiran 20 Kuesioner Penelitian

Lampiran 21 Daftar Riwayat Hidup

